

Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang)

Fahrul Alam Masruri
STIE Sebelas April Sumedang
Jalan Angkrek Situ No.19 Sumedang
email: masruri2012af@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh digulirkannya program kegiatan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentang reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun). Reformasi administrasi perlu dilakukan untuk tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi mengingat masih rendahnya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun di Kabupaten Sumedang ini. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan uji korelasi product moment dan uji f. Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi -0,261 dan derajat determinasi pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6,8% sedangkan 93,2% dipengaruhi faktor lain. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} (f_{hitung} 4,964 > f_{tabel} 3,998) sehingga hipotesis diterima atau terdapat pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.

Kata Kunci : Reformasi administrasi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak

1. PENDAHULUAN

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010: 17).

Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Eksistensi modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 hal utama, yaitu (i) restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi wajib pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi; (ii) penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada *full automation* (otomatis lengkap); (iii) penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang berlandaskan "*transparency, fairness, dan performance based*"; serta (iv) penerapan Kode Etik Pegawai secara tegas pada semua lini organisasi untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan "*good governance*".

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar, melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Murray dalam Fitriah (2011 : 5) menyatakan bahwa "rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya". Sedangkan ketidakpatuhan tersebut terlihat dari adanya gap antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang menyampaikan SPT dan jumlah SPT yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak sehingga tingkat kepatuhan dinilai masih relatif rendah.

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang, terdapat fenomena kepatuhan yang rendah khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Sumedang

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib pajak SPT	78.740	89.817	65.175	66.683	71.024
SPT tahunan PPh	35.090	35.034	31.876	30.977	42.178
Rasio kepatuhan	44,56%	27,22%	49,91%	46,45%	59,38%

Sumber : seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Sumedang

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya wajib pajak orang pribadi kurang mengerti tata cara mendaftarkan diri dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih rendahnya wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan kembali SPT tahunannya, wajib pajak yang menggunakan sistem *Self Assessment* belum sepenuhnya memahami cara perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak terutang pada waktu jatuh tempo.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan objek penelitian pada KPP Pratama Sumedang. Maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul : **“PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang)”**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana reformasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Sumedang.
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.
3. Bagaimana pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui reformasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Sumedang.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.
3. Untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang.

2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 4): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sementara itu tata cara pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan B. Ilyas dalam Fitriah (2011 : 12) asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa “pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada *Equality, Certainty, Convenience, dan Economy.*”

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu *official assesment system, self assesment system, dan with holding system* (Resmi dalam Fitriah, 2011 : 13).

Menurut Resmi dalam Fitriah (2011 : 14) menyatakan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu”.

Menurut Nasucha dalam Angkoso (2010 : 20) menyatakan bahwa: Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:

- a. Struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi.
- b. Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan.
- c. Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

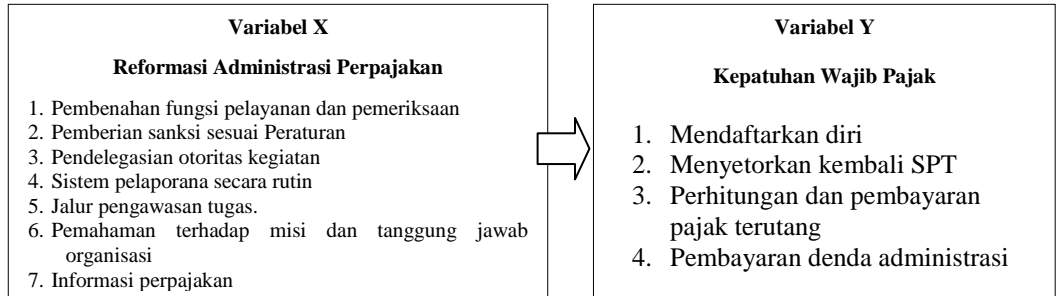
Dimensi Reformasi Perpajakan, adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi
- b. Prosedur Organisasi
- c. Strategi Organisasi
- d. Budaya Organisasi

Menurut Budiarmanto dalam Angkoso (2010: 42) berpendapat bahwa “kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu dalam Fitriah (2011 :25) mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material (Ony dalam Fitriah 2011 : 25).

2.2 Kerangka Pemikiran

Tabel 2. Paradigma Penelitian



Sumber: Nasucha dalam Angkoso (2010)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode survey pendekatan deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2012:11) yang dimaksud metode survey adalah: “Metode survey yaitu metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis”.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 371 Bandung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret, April, Mei tahun 2017.

3.2 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 86) “Desain penelitian adalah menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti kemudian membuat pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis dan kesimpulan yang diharapkan”.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
Reformasi Administrasi Perpajakan (X)	Menurut Nasucha dalam Angkoso (2010:18), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan	1. Struktur Organisasi 2. Prosedur Organisasi	1. Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan 2. Pemberian sanksi sesuai	Interval

	<p>kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi. 2. Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan 3. Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Strategi Organisasi 4. Budaya Organisasi 	<p>Peraturan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pendelegasian otoritas kegiatan 4. Sistem pelaporan secara rutin 5. Jalur pengawasan tugas. 6. Pemahaman terhadap misi dan tanggung jawab organisasi 7. Informasi perpajakan 8. Penyederhanaan formulir dan prosedur pelayanan. 	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<p>Menurut Budiarmanto dalam Angkoso (2010: 42) berpendapat bahwa: Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Formal 2. Kepatuhan Material 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri 2. Menyetorkan kembali SPT 3. Perhitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Pembayaran tunggakan dan denda administrasi 	Interval

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sumedang pada tahun 2016. Adapun jumlah populasi yang diteliti tersebut yaitu sebanyak 71.024 orang.

Dalam penelitian ini, untuk menghitung jumlah sampel yang akan digunakan penulis menggunakan rumus *slovin*. Jumlah sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebanyak 70 responden dengan metode *random sampling* yakni pengambilan sampel dari populasi secara acak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 OBJEK PENELITIAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah kantor yang khusus melayani pelaporan dalam perpajakan, sangat membantu para Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang merupakan kantor pembentukan baru sejak tanggal 28 Agustus 2007 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Sumedang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Karees dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Garut.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang Perpajakan dengan pelayanan kelas dunia dengan penerapan sistem administrasi modern, serta berusaha menerapkan trisukses yaitu sukses data, sukses pelayanan, dan sukses penerimaan, dalam mendukung tercapainya sasaran, dan mengamankan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh APBN.

4.2 Analisis Data

Tabel 4. Penilaian Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan (X)

No. Item	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor empirik	Skor max	Capaian %
1	43	13	14			70	309	350	88.3
2	18	48	25			70	294	350	84
3	36	25	9			70	307	350	87.7
4	17	40	11	2		70	282	350	80.6
5	31	28	9	2		70	298	350	85.1
6	20	38	11	1		70	287	350	82
7	28	27	14	1		70	292	350	83.4
8	20	35	12	3		70	282	350	80.6

9	27	28	14	1		70	291	350	83.1
10	23	36	11			70	292	350	83.4
11	31	30	8	1		70	301	350	86
12	27	21	20	2		70	283	350	80.9
Skor total	321	369	158	13	0	840	3518	4200	83.8

Berdasarkan tabel terlihat bahwa skor total untuk variabel reformasi administrasi perpajakan adalah 3518 dari skor harapan 4200. Penilaian responden mengenai reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat tinggi.

Tabel 5. Penilaian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No. Item	5	4	3	2	1	Jumlah	Skor empirik	Skor max	Capaian %
1	48	21	1			70	327	350	93.4
2	38	32				70	318	350	90.9
3	38	32				70	318	350	90.9
4	27	41	2			70	305	350	87.4
5	27	41	2			70	305	350	87.4
6	34	33	3			70	311	350	88.9
7	40	30				70	320	350	91.4
8	24	44	2			70	302	350	86.3
9	21	48	1			70	300	350	85.7
10	29	41				70	309	350	88.3
11	29	41				70	309	350	88.3
12	36	31	3			70	313	350	89.4
Skor total	391	435	14	0	0	840	3737	4200	89

Sumber: Data kuesioner setelah diolah, 2017

Berdasarkan tabel terlihat bahwa skor total untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 3737 dari skor harapan 4200. Penilaian responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat tinggi.

4.3 Pengujian Data

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variable X

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,333	0,232	Valid
2	0,482	0,232	Valid

3	0,443	0,232	Valid
4	0,520	0,232	Valid
5	0,280	0,232	Valid
6	0,380	0,232	Valid
7	0,437	0,232	Valid
8	0,506	0,232	Valid
9	0,545	0,232	Valid
10	0,491	0,232	Valid
11	0,530	0,232	Valid
12	0,520	0,232	Valid

Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variable Y

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,489	0,232	Valid
2	0,667	0,232	Valid
3	0,667	0,232	Valid
4	0,489	0,232	Valid
5	0,489	0,232	Valid
6	0,471	0,232	Valid
7	0,293	0,232	Valid
8	0,471	0,232	Valid
9	0,334	0,232	Valid
10	0,465	0,232	Valid
11	0,465	0,232	Valid
12	0,247	0,232	Valid

Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017

Uji Reliabilitas

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variable X dan Variabel Y

Variabel	<i>Cronbach Alph</i>	N of item	Keterangan
X	0,645	12	Reliabel
Y	0,702	12	Reliabel

Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017

Uji Normalitas

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-smirnov test	Kolmogorov-smirnov tabel	keterangan
0.171	0.144	Normal

Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, 2017

Analisis Regresi Sederhana

Tabel 10. Analisis Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.940	3.512		11.373	.000
	Reformasi administrasi perpajakan	-.206	.092	-.261	-2.228	.029

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan tabel diatas, nilai konstanta (a) adalah sebesar 39,940, sedangkan nilai (b) adalah -0,206 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$\hat{Y} = a + bX \text{ atau } \hat{Y} = 39,940 + (-0,206)X$$

Tabel 11. Hasil Uji Korelasi

		Reformasi administrasi perpajakan	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Reformasi administrasi perpajakan	Pearson Correlation	1	-.261*
	Sig. (2-tailed)		.029
	N	70	70
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Pearson Correlation	-.261*	1
	Sig. (2-tailed)	.029	
	N	70	70

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh harga r_{xy} sebesar -0,261 maka hasilnya ada pada klasifikasi rendah, karena berada pada klasifikasi -0,20 - -0,399.

Tabel 12. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	39.940	3.512		11.373	.000
Reformasi administrasi perpajakan	-.206	.092	-.261	-2.228	.029

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar -2,228. Sedangkan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan (dk) = $70 - 2 = 68$ adalah 1,9955. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} -2,228 > t_{tabel} 1,9955$) sehingga variabel X terdapat pengaruh terhadap variabel Y.

Tabel 13. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.261 ^a	.068	.054	3.74205

a. Predictors: (Constant), reformasi.administrasi.perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan.wajib.pajak.orang.pribadi

Berdasarkan tabel diatas, besarnya hubungan antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada kolom R Square yaitu sebesar 6,8 % ($0,068 \times 100\% = 6,8\%$), artinya variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dipengaruhi oleh variabel reformasi administrasi perpajakan (X) sebesar 6,8 % sedangkan sisanya sebesar 93,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Tabel 14. ANOVA (*Analysis Of Variance*)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	69.513	1	69.513	4.964	.029 ^a
	Residual	952.197	68	14.003		
	Total	1021.710	69			

a. Predictors: (Constant), reformasi administrasi perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai f_{hitung} sebesar 4,964. Sedangkan besar f_{tabel} pada taraf signifikasi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan ($dk = 70 - 1 = 69$), setelah dilihat dari tabel f ternyata (0,05)(69) tidak diperoleh dalam tabel. Untuk memperolehnya digunakan cara interpolasi. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, besar nilai f pada taraf signifikasi 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan ($dk = 70 - 1 = 69$) adalah 3,998. Maka dapat disimpulkan bahwa f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} ($f_{hitung} 4,964 > f_{tabel} 3,998$). Sehingga hipotesis yang telah diajukan penulis diterima.

5. KESIMPULAN

1. Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Sumedang diantaranya:
 - a. Reformasi dibidang struktur organisasi yaitu fungsi organisasi menjadi seksi organisasi.
 - b. Reformasi pada prosedur organisasi yaitu penyederhanaan prosedur untuk mengisi formulir Surat Setoran Pajak, dan pelaporan pajak melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak (*e-reporting, e-SPT on line*).
 - c. Reformasi pada strategi organisasi yaitu mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan.
 - d. Reformasi budaya organisasi yang dilakukan KPP Pratama Sumedang diantaranya pembentukan komite kode etik dengan meningkatkan efektivitas, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

Sedangkan berdasarkan pada analisis terhadap indikator reformasi administrasi perpajakan yakni struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi berada pada kategori tinggi. Artinya wajib pajak orang pribadi menyatakan tingkat kesetuan yang tinggi terhadap reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Sumedang.

2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang berada pada kategori tinggi. Karena berdasarkan pada analisis terhadap indikator

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yakni mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyetorkan kembali SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan pembayaran denda administrasi berada pada kategori tinggi. Artinya wajib pajak orang pribadi memiliki kecenderungan untuk kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Sumedang.

3. Reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang rendah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sumedang. Artinya dengan diadakannya reformasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Sumedang menyebabkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan kewajiban perpajakannya meskipun presentasinya rendah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti.2014. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Angkoso, Berly. 2010. "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris: Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional.2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitriah.2011. "*Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu*".UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lubis, Irwansyah. 2011. "*Hukum Pajak Indonesia*". Jakarta: YP2SDM.
- Kurniadi. 2014. "*Pengaruh Promosi Terhadap Terhadap Minat Beli Konsumen Objek Wisata Pangjujungan Kabupaten Sumedang*".STIE Sebelas April Sumedang.
- Mardiasmo.2010. "*Perpajakan Edisi Revisi 2010*". Yogyakarta: ANDI.
- Mohammad Zain. 2008. "*Manajemen Perpajakan*". Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasucha,Chaizi Dr. 2004."*Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik*". Jakarta: PT Gramedia WidiasaranaIndonesia.
- Nurkhasanah, Septiyani.2014. " *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak*".Universitas Negeri Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2010. "*Perpajakan: Teori dan Kasus*". Jakarta: Salemba Empat.
- Satriyo, Andika. 2007 . "*Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PadaKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakartsa Setiabudi*". Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. "*Perpajakan Indonesia*". Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. "*Statistik untuk Penelitian*". Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2010. "*Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat.